

penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu pertama, meningkatnya indikasi-indikasi diskriminasi pelayanan dalam penyelenggaraan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik dibutuhkan dibutuhkan aparatur yang memiliki komitmen dan semangat kerja tinggi untuk mencapai kinerja pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan, dan menghasilkan kepuasan dari masyarakat.

Pada masa reformasi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan justru semakin gencar diperjuangkan bahkan diapresiasi dalam kehidupan sehari-hari mengingat untuk mendapatkan layanan yang baik dan memuaskan masih dihadapkan oleh pilihan yang sulit. Padahal di era reformasi seperti sekarang ini seharusnya masyarakat mendapatkan kemudahan-kemudahan yang dapat mendorong berkembangnya dunia usaha, apalagi seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, sudah selayaknya masyarakat mendapatkan kepuasan sebagaimana yang diharapkan, tetapi dalam kenyataannya justru masih saja terjadi keluhan masyarakat yang kurang puas atas layanan yang diberikan berbicara tentang pelayanan publik memang tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana juga kebijakan yang mengatur tentang pelayanan, terutama mengenai jalur birokrasi yang selama ini sering menjadi perbincangan dikalangan dunia usaha, karena masih mengindikasikan berbelit-belit.

Kinerja birokrasi pemerintahan Jokowi-JK dalam bidang pelayanan publik dipersepsikan membaik, meskipun tingkat kepuasan publik terhadap

Sebagai contoh terkecil pemerintahan salah satunya layanan publik pihak kelurahan. Di situ kita bisa melihat betapa buruknya sebuah kinerja layanan yang jauh dari harapan. Mereka memandang sebuah jabatan ataupun bagian kerja adalah sebuah rutinitas, melayani kebutuhan masyarakat tanpa adanya profesionalisme ataupun *service* yang baik, bahkan jauh dari harapan masyarakat sebagai *customer* mereka.

Kita dapat merasakan mulai dari jam kerja yang molor, bahkan setiap hari pasti ada yang tidak masuk karena alasan yang tidak jelas hingga tata cara kerja yang seolah-olah tidak adanya target dan *administrative* yang tidak baik menjadikan semua permasalahan harus ditanggung oleh masyarakat yang mau tidak mau harus menyerah kepada mereka. Kita dapat melihat betapa santainya pegawai kelurahan dan buruknya dalam pelayanan, misalnya dalam pembuatan KTP.

Betapa kecewanya kita disaat hendak mengurus sebuah KTP harus bersusah payah untuk mendapatkannya. Berbagai alasan terlontar disaat kita akan mendapatkannya, mulai dari antrian, blanko yang kosong, pejabat kelurahan yang belum hadir, dan lain-lain tanpa adanya kejelasan yang pasti. Padahal kita sudah meluangkan waktu dan memenuhi segala persyaratan. Namun yang terjadi adalah kekecewaan yang seolah-olah harus kita tanggung sebagai harga mahal membuat KTP.

Sungguh ironis disaat kita harus mendapatkan hak sebagai warga negara namun tidak ada pelayanan yang baik bagi kita, padahal kita sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Mulai dari membayar pajak,

Konsep *Building Learning Power (BLP)* adalah salah satu konsep dari Bimbingan Konseling Sosial yang berfungsi sebagai meningkatkan kemampuan belajar manusia untuk dapat meningkatkan kualitas diri dengan baik dan secara nyata. Pengertian belajar dalam konteks *Building Learning Power* adalah penyesuaian diri terhadap situasi baru dimanapun pelajar berada.

Menurut konsep Agama, setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah (Suci) artinya oleh Allah manusia telah diciptakan dalam keadaan sempurna dengan segala potensi baiknya yang siap untuk dikembangkan.

Konsep *Building Learning Power* yang diartikan dengan Membangun Kapasitas belajar guna menghasilkan pribadi yang sangat Siap, Rela, dan Mampu. Konsep yang semula diterapkan diarah Civitas Akademika itu ternyata sangat berguna dan efektif jika diterapkan di ranah organisasi dan pemerintahan guna menumbuhkan etos kerja pada setiap anggota maupun pegawainya, sehingga dengan potensi yang dimiliki akan tersalurkan kepada masyarakat dengan diiringi dengan etos kerja yang baik pula.

Desa Ketajen merupakan desa yang terletak di kecamatan Gedangan Sidoarjo, dan Desa Ketajen merupakan salah satu desa yang baik dalam sistem birokrasi dan pelayanan masyarakat. Semula, sistem pemerintahan desa ketajen tergolong pasif terhadap pelayanan dan pengembangan masyarakat, namun seiring berjalannya waktu, kepala desa dan perangkat desanya mulai menindaklanjuti kepasifan sistem pemerintahannya sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu dengan cara menumbuhkan etos

orang penting diwilayahnya untuk menjadi motorik atau penggerak terhadap anggota lainnya, *Senior Team Leader* (STL) bergerak dengan impian, tujuan dan harapan yang sama. Sehingga seluruh energi positif yang berasal dari para *Senior Team Leader* (STL) ini akan memancar dan menular kepada para perangkat lain khususnya dan kepada masyarakat desa Ketajen umumnya. Hari kehari strategi STL tersebut dijalankan. Pada akhirnya konsep *Building Learning Power* (BLP) dan strategi *Senior Team Leader* (STL) ini berhasil diterapkan di sistem pemerintahan dan pelayanan desa Ketajen sehingga semua warga ketajen juga terkena imbas kebaikannya, khususnya seluruh perangkat desa yang telah terpancar energi positif dari sikap kesadaran, toleran, serta meningkatnya etos kerja dengan kualitas dirinya para *Senior Team Leader* (STL) hingga sampai sekarang ini.

Dari hasil konsep *Building Learning Power* yang diterapkan di perangkat desa tersebut, ternyata pengaruhnya sangat luar biasa terhadap etos kerjanya, dan efek baiknya akan tertuju pada Masyarakat dan desa Ketajen itu sendiri. maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di ranah pemerintahan desa tersebut dengan mengambil judul Bimbingan Konseling Sosial melalui Konsep *Building Learning Power* dalam Meningkatkan Etos Kerja Perangkat Desa di Desa Ketajen Kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo.

nyaman, guyup, dan tentram jika melihat sistem pemerintahan desanya terorganisir dengan baik, terlebih manfaatnya akan didapat oleh desa itu sendiri, karena dengan dukungan hubungan yang simbiosis mutualisme antara masyarakat desa dan pemerintah maka, program kerja keperintahannya terlaksana dengan baik.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,¹⁰ yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistik*) dan dapat mengungkapkan rahasia dan makna tertentu. Penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹¹

Dan jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas

¹⁰Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistik. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat wajar, tanpa dimanipulasi dan diatur oleh eksperimen dan tes. Lihat Nasution, *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), h. 18

¹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Karya, 1998), h. 20-

terhadap data itu. Sebagai perbandingan triangulasi ini digunakan dengan cara membandingkan dan mengecek derajat balik kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode penelitian, hal ini bisa membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan, atau juga membandingkan hasil wawancara dari 2-3 informan yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama yang menunjukkan keabsahan sebuah hasil penelitian adalah, valid, reliabel dan obyektif.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, dan metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, tahap-tahap penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta teknik keabsahan data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang kajian teoretik yang meliputi pengertian, Tujuan, Fungsi, Langkah Penyelenggaraan, serta Teori – Teori yang mendasari bimbingan Konseling Sosial, serta memaparkan tentang konsep *Building Learning Power* (BLP) yang digunakan untuk pelaksanaan Proses Bimbingan Konseling Sosial.

